

RINGKASAN

FAUZAN EKA PRASETIA, Program Studi Ilmu Hukum-Program Pasca Sarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Efektivitas Sanksi Pidana Denda Pada Tindak Pidana Perpajakan Dalam Memaksimalkan Pendapatan Negara Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H, Anggota : Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.

Pelaksanaan dan penegakkan tindak pidana dibidang perpajakan dalam UU KUP *Juncto* UU Cipta melalui penjatuhan pidana penjara disertai pidana denda oleh Majelis Hakim tentu tidak hanya berupa penghukuman badan terhadap pelaku kejahatan, tetapi diharapkan sebagai upaya memaksimalkan pendapatan negara melalui upaya paksa yang terkandung dalam hukum pidana melalui pembayaran pidana denda. Kebijakan formulasi hukum pidana di bidang perpajakan dalam implementasinya ternyata menimbulkan berbagai persoalan salah satunya dalam hal penerapan sanksi pidana denda.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana efektivitas sanksi pidana denda pada tindak pidana perpajakan dalam memaksimalkan pendapatan negara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ? 2. Apakah yang menjadi kendala dalam mewujudkan efektivitas sanksi pidana denda pada tindak pidana perpajakan dalam memaksimalkan pendapatan negara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara mendalam dan studi kepustakaan yang diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif dan penyajian data dalam bentuk teks naratif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan pidana denda pada tindak pidana di bidang perpajakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang belum efektif dalam memaksimalkan pendapatan negara. Dimana mulai tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2021 tidak ada pembayaran pidana denda oleh Terpidana sebagai penerimaan pendapatan negara, tetapi Terpidana menjalankan pidana kurungan pengganti.

Hal tersebut disebabkan karena dari segi substansi hukum UU KUP *Juncto* UU Cipta Kerja tidak mengatur adanya upaya paksa pelaksanaan pidana denda yang menyebabkan ketidakkonsistensian putusan hakim dalam menjatuhkan pidana denda sehingga menyulitkan bagi Jaksa selaku eksekutor dalam mengoptimalkan pendapatan negara dari pembayaran pidana denda tersebut, dari segi struktur hukum Penyidik PPNS pada DJP Jateng I tidak maksimal dalam melaksanakan kewenangan pasal 44 ayat (2) UU KUP untuk melakukan penyitaan harta benda milik pelaku, sehingga jaksa mengalami kesulitan mengeksekusi putusan pidana denda yang tidak memuat barang bukti yang dirampas untuk negara, dari segi budaya hukum kesadaran hukum masyarakat wajib pajak yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang telah dijalankannya serta masih ada anggapan uang pajak adalah bagian keuntungan yang diperoleh oleh wajib pajak, wajib pajak sebagai terpidana lebih memilih menjalani pidana kurungan pengganti daripada membayar pidana denda yang tinggi.

Kata Kunci : efektivitas sanksi pidana, pendapatan negara, tindak pidana perpajakan.

SUMMARY

FAUZAN EKA PRASETIA, Legal Studies Program-Post Graduate Program, Jenderal Soedirman University, The Effectiveness of Fines on Tax Crimes in Maximizing State Revenue in the Legal Area of the Semarang District Court, Advisory Commission, Chair : Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H, Member : Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.

The implementation and enforcement of criminal acts in the field of taxation in the UU KUP Juncto UU Cipta through the imposition of imprisonment accompanied by a criminal fine by the Panel of Judges is certainly not only in the form of corporal punishment of criminals, but is expected to be an effort to maximize state revenue through coercive measures contained in criminal law through payments. fines. The policy of formulating criminal law in the field of taxation in its implementation turns out to cause various problems, one of which is in terms of the application of criminal sanctions to fines.

The formulation of the problem in this study is 1. How is the effectiveness of criminal sanctions for tax crimes in maximizing state revenues in the jurisdiction of the Semarang District Court? 2. What are the obstacles in realizing the effectiveness of criminal penalties for tax crimes in maximizing state revenues in the jurisdiction of the Semarang District Court?

The approach method used in this research is sociological juridical research. The sources of legal materials contained in this study came from primary, secondary and tertiary legal materials with data collection techniques based on in-depth interviews and literature studies which were processed and analyzed by qualitative methods and presented data in the form of narrative texts.

Based on the results of the study, it is known that the implementation of criminal penalties for criminal acts in the field of taxation in the jurisdiction of the Semarang City District Court has not been effective in maximizing state revenue. Where from 2019 to May 2021 there is no payment of criminal fines by the convict as state revenue receipts, but the convict carries out a substitute confinement sentence.

This is because in terms of the legal substance of the Juncto KUP Law, the Job Creation Law does not regulate the existence of forced efforts to implement the criminal fine which causes inconsistency in the judge's decision in imposing fines, making it difficult for the Prosecutor as the executor in optimizing state revenue from the payment of the fine, in terms of structure. PPNS investigators at DJP Central Java I are not optimal in carrying out the authority of Article 44 paragraph (2) of the KUP Law to confiscate the property belonging to the perpetrators, so that prosecutors have difficulty executing criminal decisions on fines that do not contain evidence confiscated for the state, in terms of legal culture. the legal awareness of taxpayers who want to get the maximum benefit from the business they have run and there is still an assumption that tax money is part of the profits obtained by taxpayers, taxpayers as convicts prefer to undergo substitute confinement rather than pay ar high fines.

Keywords: effectiveness of criminal sanctions, state revenue, tax crimes.